



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. SANUSI
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 49428

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.919.097.000

1. Tanah Seluas 5920 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 228.400.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1106 m2/150 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 308.288.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m2/186 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 376.198.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 710 m2/250 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 181.000.000
5. Tanah Seluas 10900 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 170.000.000
6. Tanah Seluas 2117 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 186.212.000
7. Tanah Seluas 3097 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 193.619.000
8. Tanah Seluas 8369 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 275.380.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 489.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
2. MOTOR, HONDA CRF 150 TRAIL Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000



3. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 33.340.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 351.517.122

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.792.954.122

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.792.954.122

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.